

Pemberdayaan UMKM Dan Sektor Logistik Untuk Mempertahankan Produktivitas Produk Lokal Yogyakarta di New Normal

Pada hari senin tanggal 2 maret 2020 Indonesia secara resmi mengkonfirmasi adanya kasus corona atau yang lebih dikenal 2019-nCoV (COVID-19). Hingga saat ini covid-19 masih belum ditemukan vaksin yang benar-benar mampu untuk mengobati covid-19, satu-satunya strategi yang bisa diterapkan oleh masyarakat adalah dengan menjaga pola hidup sehat dan melakukan social distancing dan physical distancing dan pemberlakuan Work From Home (WFH) yaitu dengan memperkerjakan karyawan dari rumah atau membatasi jumlah karyawan yang datang. Bagi beberapa perusahaan hal ini akan sangat berpengaruh terutama dalam hal pemenuhan produksi.

Usaha yang paling terdampak dari sistem ini adalah Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), dimana pada bulan juni kemarin menurut data dari Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, penurunan produksi yang dialami pelaku UMKM mencapai angka 70 persen, dimana penurunan terbesar terjadi pada bidang craft dan jasa yang disusul pada bidang kuliner dan pakaian yang mengalami penurunan 50 persen. Penurunan produksi harus dilakukan karena minat pasar khususnya wisatawan mengalami penurunan selama masa pandemi ini. Banyaknya pelaku UMKM yang beralih dari produksi aslinya, bahkan untuk daerah Yogyakarta saja, tercatat setidaknya ada 119 UMKM beralih menjadi produksi alat-alat kesehatan seperti masker, sarung tangan dan lain sebagainya. Dan setidaknya terdapat 100 UMKM beralih pada bisnis dengan memproduksi makanan.

Di tengah kesulitan yang ada, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan Ekstensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Yogyakarta. Acara ini bertujuan untuk memberikan stimulus dan motivasi kepada pelaku UMKM agar bisa bertahan di masa pandemi covid-19 ini. Kegiatan tersebut diikuti oleh 20 produk UMKM kreatif keunggulan wilayah Yogyakarta yang terdiri

dari produk pangan, kriya, fashion dan hobi. Keberadaan UMKM ini juga sejalan dengan pemerintah yang ingin menggerakkan perekonomian dan aktivitas logistik di tengah-tengah masyarakat agar bisa meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup bagi masyarakat itu sendiri.

Dalam perkembangannya, dan bahkan di tengah kondisi pandemi covid 19, ada beberapa sektor yang bersinggungan langsung dengan UMKM, yakni sektor logistik yang memainkan peranan cukup vital di dalam aktivitas usaha dari UMKM. Sistem logistik sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM untuk meningkatkan efisiensi aliran bahan, barang, informasi, dan uang yang akan berdampak terhadap produktivitas. Dengan adanya pemenuhan kebutuhan berbagai macam barang-barang keperluan produktivitas UMKM lewat sektor logistik, maka keberlangsungan bisnis UMKM bisa berjalan dengan baik. Keberlangsungan sektor UMKM ini tidak bisa dilepaskan dari percepatan pengiriman barang lewat sektor logistik, maka roda perekonomian dan juga proses pemenuhan kebutuhan di masyarakat juga akan terjaga dengan baik.

Diantara UMKM yang bertahan adalah usaha produk kerajinan mebel yang memiliki pasar ekspor ke negara-negara eropa, meskipun produksi mereka tidak sebanyak kondisi sebelum pandemi. Selain itu, UMKM yang bergerak dibidang kuliner juga mampu bertahan, karena kebutuhan pangan masyarakat tetap berjalan, hanya saja pola distribusi barang dan kebutuhan tersebut yang berubah dengan mengandalkan UMKM sektor logistik. Bahkan sektor logistik ini menjadi salah satu industri yang tak hanya mampu bertahan di tengah pandemi tapi juga dilaporkan sebagai usaha yang tumbuh signifikan di tengah pandemi covid 19.

Hal ini tidak terlepas dari perubahan perilaku masyarakat dalam membelanjakan uang mereka melalui e-commerce, dan memanfaatkan jasa pengiriman paket sebagai solusi di tengah keterbatasan saat

ini. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam pengiriman barang skala besar, juga beralih pada pengiriman retail kecil, sebut saja PT KAI yang mengalami penurunan yang signifikan dari pengiriman batu bara beralih pada pengiriman barang dari berbagai UMKM dengan bekerja sama dengan berbagai pihak ojek online. Begitu juga pengiriman barang melalui jasa penerbangan, dengan penurunan penumpang, banyak perusahaan juga memaksimalkan potensi layanan kargo.

Aktivitas Ekspor dan Import Yogyakarta di New Normal

Secara umum, terjadi penurunan produksi karena turunnya minat beli pasar, dan mengakibatkan banyaknya produksi masyarakat atau UMKM yang beralih fungsi. Hal tersebut tentunya berdampak sangat besar pada pasar barang produksi pengusaha di berbagai daerah. Untuk daerah Yogyakarta misalnya yang selama ini telah banyak memproduksi berbagai macam kerajinan yang sudah terkenal hingga manca negara. Produk-produk hasil produksi pengusaha di Yogyakarta banyak yang telah di ekspor ke luar negeri, seperti kerajinan, kain, pakaian dan sebagainya. Badan pusat statistik kota Yogyakarta juga mengamini kondisi ini, karena data yang ada, nilai ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta Agustus 2020 mencapai US\$31,2 juta atau turun 4,59 persen dibanding ekspor Juli 2020. Secara kumulatif, nilai ekspor Januari-Agustus 2020 mencapai US\$242,2 juta atau turun 8,40 persen dibanding periode yang sama 2019. Pakaian Jadi, Perabot, Penerangan Rumah dan Jerami atau bahan anyaman merupakan tiga kelompok komoditas dengan nilai ekspor tertinggi pada bulan Agustus 2020 masing-masing sebesar US\$10,2 juta; US\$5,2 juta; dan US\$2,2 juta.

Keadaan ini berbanding terbalik dengan nilai ekspor yang mengalami penurunan, nilai import justru mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Pada bulan agustus

diketahui mencapai US\$14,3 juta atau naik 68,24 persen dibanding Juli 2020. Secara kumulatif, nilai import Januari-Agustus 2020 mencapai US\$79,6 atau naik 37,01 persen dibanding periode yang sama 2019. Salah satu penyebab penurunan nilai ekspor lebih karena adanya penundaan dan pembatalan pesanan selama masa pandemi ini, ditambah lagi para pelaku usaha harus menghadapi kesulitan dalam memasarkan barang dan hasil produksi mereka. Sulitnya memasarkan barang tentu saja berakibat pada laju pertumbuhan usaha yang lambat untuk berkembang.

Langkah Penyelesaian

Langkah konkrit dilakukan oleh pemerintah untuk membantu pelaku UMKM untuk terus bisa bertahan dalam menghadapi permasalahan yang muncul, salah satunya adalah kebijakan pemerintah, melalui Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan membuat stimulus non fiskal untuk melengkapi paket kebijakan stimulus fiskal jilid II. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah:

1. Penyerahan dan pengurangan pada jumlah larangan dan pembatasan atau lartas pada aktivitas ekspor. Pengurangan pembatasan atau tata niaga impor khususnya bahan baku, percepatan proses impor untuk 500 importir, dan efisiensi proses logistik. Dengan diadakannya kebijakan ini, kegiatan ekspor dapat berjalan dengan lancar dan meningkatkan daya saing para pelaku ekspor dalam negeri.
2. Penyerahan dan pengurangan untuk jumlah larangan dan pembatasan bagi aktivitas impor terutama bahan baku. Hal ini bertujuan agar pasokan bahan baku tetap lancar dan tersedia.
3. Pemerintah memberikan percepatan proses bagi reputable traders, yakni para pelaku ekspor atau impor yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi.
4. Peningkatan dan percepatan layanan untuk proses ekspor dan impor dengan pengawasan melalui National Logistic

Ecosystem (NLE).

Selain kebijakan tersebut pemerintah juga menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) senilai 2,4 juta rupiah bagi pelaku UMKM yang terdampak covid-19, BLT sendiri sudah mulai diberikan dibulan oktober ini, di Yogyakarta sendiri BLT sudah mulai bisa diambil di Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tanggal 21 Oktober kemarin. Selain hal itu, pemerintah DIY juga mengeluarkan kebijakan bagi UMKM yang menjadi mitra Dinas Koperasi UKM DIY, dengan memberi mereka fasilitas bebas ongkos kirim yang di-branding dengan SIBAKUL JOGJA free-ongkir. Usaha ini sebagai aksi nyata untuk pemberdayaan UMKM yang terpuruk, sekaligus melakukan pembinaan terhadap UMKM. ■

Dr. Capt. Fausta Ari Barata, M.M
UNTAG Surabaya, Indonesia
fausta.untagsby@fab-enterprises.com

Penulis adalah Dosen dan juga sebagai (Assistant Professor) Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya 2019. Selain itu, juga aktif sebagai Reviewer JResLit (Journal of Research Literature) USA dan JGBMR (Journal of Global Business & Management Review) UIB Batam hingga sekarang. Disamping aktivitas mengajar, Dr. Capt. Fausta Ari Barata, M.M juga menjadi pimpinan dan sekaligus pendiri FAB ENTERPRISES Group (www.fab-enterprises.com) dari 2011 hingga hari ini. FAB ENTERPRISES Group adalah perusahaan logistik (4PL) bergerak dalam bidang logistic-shipping-Supply chain dan konsultan.



Kampanye Kreatif dengan 'Flashmob'

WONOSARI (KR) - Kampanye dengan cara berbeda dilakukan paslon bupati Prof Sutrisna Wibawa MPd-Mahmud Ardi Widanto SIP. Bersama Ketua DPD PKS Gunungkidul Ari Siswanto, Prof Sutrisna menyapa para pengguna jalan raya warga yang melintas di Bundaran Siyono, Playen, Minggu (15/11). "Kami ingin membawa pesan bahwa Pilkada 2020 bisa dilakukan dengan suasana gembira. Seluruh kader melakukan flashmob dengan kegembiraan dan kreativitas, untuk mengenalkan Calon Bupati Koalisi Kadhung Trisna yakni Prof Sutrisna Wibawa dan Mahmud Ardi Widanto," kata Ari Siswanto.

Dalam Pilkada Gunungkidul, Kadhung Trisna menargetkan meraih 250 ribu suara. Prof Sutrisna Wibawa mengungkapkan, kampanye kreatif layaknya Flashmob kali ini ikut berperan vital dalam stra-

tegi pemenangan Kadhung Trisna. Sehingga dari sekitar 600 ribu pemilih di Gunungkidul, ditargetkan bisa meraih 250 ribu suara. "Flashmob ini bisa mengenalkan ke kalangan milenial. Sekaligus pada Sedulur Lajon (masyarakat Gunungkidul yang melintasi Jalan Wonosari setiap harinya untuk bekerja di Jogja)," ujar Sutrisna.

Sutrisna menambahkan, guna menggaet kalangan milenial dan para pekerja di dalam Flash-



Prof Sutrisna Wibawa MPd di kompleks Bunderan Siyono, Playen.

mob, program-program berbasis pendidikan dan ekonomi padat karya menjadi prioritas. Berdirinya kampus dan peningkatan pendidikan, masyarakat Gunungkidul nantinya tidak perlu jauh studi ke Yogya. "Program berbasis padat karya seperti Inkubator Bisnis UMKM, Petani Milenial, dan Kota Pelabuhan "Minapolitan" Gesing, maka masyarakat bisa produktif dan berkarya di kampung halaman sendiri," jelasnya.

(Ded)-f

Belum Ada Pembelajaran Tatap Muka

WATES (KR) - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kulonprogo hingga November 2020, belum mengagendakan pembelajaran tatap muka sekolah SD dan SMP di tengah pandemi Covid-19.

Hampir satu semester tahun ajaran 2020/2021, satuan pendidikan SD dan SMP, melaksanakan Belajar dari Rumah.

Setiap satuan pendidikan wajib mempersiapkan kelengkapan protokol kesehatan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka.

"Disdikpora Kulonprogo sampai saat ini belum memiliki rencana, mulai kapan sekolah SD dan SMP melaksanakan pembelajaran tatap muka," ujar Arif Prastowo, Kepala Disdikpora Kulonprogo,

kemarin. Menurutnya, satuan pendidikan SD dan SMP di Kulonprogo masih menunggu kebijakan dari Disdikpora DIY.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan ketentuan dan syarat penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

(Ras)-f

Dikembangkan Obwis Pantai Bidara Bugel

PANJATAN (KR) - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memberikan dukungan terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Kulonprogo. Di antaranya, Pantai Bidara, Kalurahan Bugel Kapanewon Panjatan, dikembangkan.

"Dikembangkan misalnya dengan memberi dukungan, fasilitas pariwisata seperti papan penunjuk arah, jaringan air, wastafel dan sabun cuci tangan dan jaringan listrik serta tempat sampah," kata Wastutik selaku Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Direk-

torat Pengembangan Destinasi Regional I, Kemenparekraf, kemarin. Dalam kesempatan itu ikut tradisi *Sambang Gisik* atau menyambang pantai.

Seluruh fasilitas yang diberikan merupakan bagian dari Program *Cleanliness, Healthy, Safety and Enviromental Sustainability* (CHSE) saat ini digencarkan Kemenparekraf.

Bupati Drs Sutedjo berharap berbagai upaya yang dilakukan pemerintah hendaknya bisa membangkitkan industri pariwisata di kabupaten ini. Dalam membangkitkan kepariwisataan Kulonprogo, pemkab telah membentuk tim produksi pariwisata kolaboratif.

(Rul)-f



Wastutik dan Bupati Sutedjo mengikuti ritual Sambang Gisik.

FRAKSI PARTAI GOLKAR MENOLAK

Raperda Penyesuaian Tarif PBB-P2

PENGASIH (KR) - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kulonprogo, belum sependapat akan disahkannya penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

"Kami mendapat masukan dari berbagai pihak, bahwa mereka belum sependapat terkait tarif PBB P2 dinaikkan. Yakni masukan dari masyarakat, tokoh masyarakat, lurah dan pamong lurah, serta hasil audiensi yang diadakan DPRD Kulonprogo antara pangsus PBB P2 dengan pamong kalurahan, maka Fraksi Golkar menolak Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pa-

jak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda)," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kulonprogo Widiyanto SP, Minggu (15/11).

Perubahan pertama Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Fraksi Golkar juratan sudah mendapatkan keluhan masyarakat atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan



KR-Widiyastuti

Widiyanto

Perkotaan (PBB P2).

"Masyarakat ketaget. Kami berharap tidak ada kenaikan PBB P2 lagi pada Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang saat ini dibahas di DPRD Kulonprogo," ujarnya.

Bahasa penyesuaian tarif pada Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, tetap memiliki arti sama menaikkan tarif PBB P2. "Karena itu, kami menolak Raperda ini disahkan menjadi perda, karena akan berdampak pada keresahan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 ini," ucap Widiyanto.

Dikatakan Widiyanto, alasan lain Fraksi Golkar menolak pengesahan Raperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi perda, adalah kondisi pandemi Covid-19 yang membuat kondisi ekonomi masyarakat terpuruk, sehingga tidak pantas, masyarakat dibebani kembali dengan kenaikan PBB P2.

(Wid)-f

Hanasto, Juara 1

Lomba Aplikasi Mobile

WONOSARI (KR) - Hanasto SPdI MSi, guru SMP Muhammadiyah Al Mujahidin meraih juara 1 dalam Lomba Aplikasi Mobile diselenggarakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul. Pada lomba Aplikasi, Hanasto membuat karya berupa Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam layanan pembelajaran di sekolah.

Sebelumnya juga telah meraih berbagai lomba seperti Lomba Aplikasi Mobile Ki Hajar yang diselenggarakan oleh BTKP DIY juga meraih juara 1 dengan Aplikasi Supervisi Akademik. "Aplikasi SIM berupa layanan pembelajaran di sekolah," kata Hanasto, Sabtu (14/11).

Kepala SMP Muh Al Mujahidin Agus Suroyo MPd I menyambut gembira atas prestasi yang diraih guru di instansinya tersebut. Harapannya prestasi tersebut dapat menginspirasi guru-guru lainnya untuk berprestasi. Sesuai dengan visi sekolah terwujudnya sekolah unggul, berbudi dan berprestasi diharapkan sekolah dapat membangun iklim semangat berprestasi bagi guru maupun siswa.

"Diharapkan mampu menginspirasi guru lain untuk meningkatkan prestasi," jelasnya.

(Ded)-f



KR-Dedy EW

Hanasto (kiri) terpilih sebagai guru berprestasi.

BAHRON ROSYID KETUA IPHI GUNUNGKIDUL Tingkatkan Peran untuk Umat



KR-Endar Widodo

H Bahron Rosyid SPd MM menyampaikan sambutan.

WONOSARI (KR) - H Bahron Rosyid SPd MPd, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Gunungkidul terpilih sebagai Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) periode 2020-2025 dalam Musyawarah Daerah (Musda) di Masjid Raya Kota Wonosari, Sabtu (14/11). Hadir dalam acara pembukaan Ketua IPHI Wilayah DIY Drs H M Hafidz Asrom MM beserta pengurus lain, Asisten I Pemkab Gunungkidul Drs Sigit Purwanto, Ketua Pengda MUI Gunungkidul H Iskanto AR SAG, Kemeng dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Bahron Rosyid sebagai ketua terpilih akan segera menyusun pengurus lengkap didampingi, tim formatir Ir H Edy Praptono MSi, Drs H Ahmad Samin Fauzi MPdI dan Hj Badiah Bardan SPdI yang oleh Musda dipilih sebagai wakil-wakil ketua.

Para ketua terpilih diminta untuk melengkapi susunan pengurus lainnya, seperti sekretaris, bendahara dan bidang-bidang.

Sebelum memilih pengurus periode 2020-2025, sebagaimana organisasi lain, Musda melakukan sidang-sidang yang mendengarkan laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2015-2020, menyusun program kerja dan sebagainya. "Tema Musda tahun 2020 ini, meningkatkan kontribusi IPHI untuk kemaslahatan umat, kegiatan yang sudah diprogramkan, agar peran IPHI segera dirasakan umat khususnya, masyarakat," ujarnya.

(Ewi)-f